

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ashofa, B , 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Ineka Cipta, Jakarta
- Dwiyanto,A, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press , Yogyakarta
- Fahmal, M, 2006, *Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta
- Haryanto, I, 2005, *Apa itu Kebebasan Memperoleh Informasi?*, Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan UNESCO, Jakarta
- Kau Sofyan A.P,2013, *Metode Pebelitian Hukum Islam*, Mitra Pustaka, Yogyakarta
- Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Ketertutupan Informasi*, 2003, USAID dan The Asia Foundation,Jakarta
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Anotasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, 2009, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta
- Jafar Muhammad , 2002, *Pelayan Publik*, PT Citra Aditya bakti, Bandung
- Nurmadjito, 2015, *TANYA JAWAB UNDANG – UNDANG PELAYANAN PUBLIK*, Mandar Maju, Jakarta
- Pardede, M, 1989, *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia*, Angkatan Bersenjata, Jakarta
- Ratminto, Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter, dan Standar Pelayanan Minimal*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Retnowulan, Oeripkartawinata,1989, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktik*, Mandar Maju, Bandung

Saleh, K.W , 1977, *Kehakinan dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soemitro, R.H, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indah, Jakarta

Soedarmayanti, 2003, *GOOD GOVERNANCE (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung

Widodo, J, 2001, *Good governance Telaah dari Dimensi akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya

Zulkarnain, Sirajuddin, Widiarto, 2006, *Menggagas Keterbukaan Informasi Publik: Upaya Kolektf Berantas Korupsi*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang

B. Peraturan dan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Surat Keputusan Nomor W12-A2/1907/Hk.05/VI/2014 tentang Biaya Perolehan Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Agama Sleman

C. Internet

Hermansyah, “MA Peringkat Delapan Keterbukaan Informasi Publik 2014”, <http://www.badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ma-peringkat-delapan-keterbukaan-informasi-publik-2014> , diakses pada 1 Maret 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , www.paslemankab.go.id, diakses pada tanggal 12 Febuari 2016

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015, www.komisiinformasi.go.id, diakses pada tanggal 3 Maret 2014

Pengertian asas: dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), <http://kbbi.web.id/asas> ,diakses pada tanggal 1 maret 2016

Redaktur Pengadilan Agama Manado, “Manfaat Keterbukaan Informasi Publik” , http://www.ptun-manado.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Amanfaat-keterbukaan-informasi-publik&catid=116%3Akip&Itemid=1, pada tanggal 27 Mei 2013 , diakses pada tanggal 14 Januari 2016